

PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Syahrial

STIS As-Saadah Sukasari Sumedang

syahrialbdg@yahoo.co.id

ABSTRACT

West Java Province in an effort to improve people's welfare, the West Java Provincial Government is trying to increase Regional Income (PD), one of which is through taxes. In the regional income report of West Java Province, local taxes are sourced from motor vehicle taxes, motor vehicle fuel taxes, and cigarette taxes with text data types. This thesis aims to determine and analyze the effect of local taxes on local revenue in West Java province for the 2020-2021 period. The data analysis technique used in this research is data normality test, product moment correlation analysis, simple linear regression analysis, coefficient of determination analysis, and t-test. From the results of this study indicate that local taxes have a significant effect on local revenue in the province of West Java.

Keywords: Local Tax, Local Revenue

PENDAHUALUAN

Provinsi Jawa Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Daerah (PD) salah satunya melalui pajak. Dalam laporan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pajak daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok dengan tipe data teks. BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebut, melemahnya ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap pendapatan daerah Provinsi Jabar. PPKM Terus Diperpanjang, PHRI Jabar: Bisnis Perhotelan Semakin Terpuruk Menurut Uu, turunnya

pendapatan daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar selama ini terjadi akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Meski begitu, kata UU, Pemprov Jabar terus berupaya membuat terobosan untuk menggenjot pendapatan daerah, khususnya dari PKB, yakni mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan berbagai program keringanan dan stimulus. "Yang menjadi sorotan antara lain tentang berkurangnya pendapatan, termasuk berkurangnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor," tutur Uu, Kamis (29/7/2021). UU menjelaskan, tidak tercapainya pendapatan daerah, khususnya pendapatan dari PKB akibat penurunan pendapatan para wajib pajak menyusul maraknya pemberhentian sementara pembayaran pajak hingga rendahnya konsumsi masyarakat akibat penurunan daya beli. "Sehingga, di tengah pandemi saat ini, masyarakat lebih mengutamakan pengeluarannya untuk kebutuhan harian dan memilih menunda membayar pajak, meskipun sudah jatuh tempo," ungkap Uu. Selain itu, penurunan pendapatan PKB juga dikarenakan ada kekurangan penetapan PKB dan kekurangan penetapan tarif PKB. Menurutnya, hal itu karena tidak adanya penerapan tarif PKB secara progresif atas kepemilikan kendaraan pribadi yang bukan kepemilikan pertama, sehingga perlu optimalisasi sektor pajak dalam pendataan dan penetapannya. Bandung-Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan terjadi defisit anggaran hingga Rp5 triliun karena menurunnya pendapatan. Kepastian ini juga menepis beredarnya informasi Pemprov Jawa Barat kehabisan anggaran Rp 5 triliun. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Nanin Hayani Adam mengatakan terjadi defisit anggaran Rp5 triliun pada APBD Jabar yang disebabkan prediksi anggaran yang tidak tercapai. "Dari target Rp41,4 triliun diprediksi hanya tercapai Rp35,8 triliun. Solusi untuk menutupi defisit itu adalah mengurangi belanja di tahun 2021," katanya dari keterangan resmi, Kamis (22/7/2021). Hal ini ditengarai karena pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) Jabar pada triwulan I dan II tahun 2021 menurun dibanding triwulan III dan IV tahun 2020. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Hening Widiatmoko upaya penarikan pajak kendaraan diakui tidak optimal karena daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi. "Daya beli masyarakat menurun akibat pandemi, yang juga berdampak kepada pembayaran PKB. Banyak di antara mereka yang pendapatannya menurun bahkan terkena PHK," ucap Hening. Dia menjelaskan tulang punggung pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, penurunan pendapatan dari PKB berpengaruh besar pada pendapatan daerah dari sektor pajak.

Gambar 1

Perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 - 2021

No	Tahun	Bulan	Jumlah PKB
1	2020	Triwulan 3 & 4	Rp4.060.249.125.192
2	2021	Triwulan 1 & 2	Rp3.749.897.646.800

Sumber : diolah sendiri

"Selisih pendapatan dari PKB antara triwulan 3 dan 4 tahun 2020 dan triwulan I dan II tahun 2021 lebih dari 300 miliar atau sekitar 7,64 persen," paparnya. Pendapatan PKB triwulan III dan IV tahun 2020 sebesar Rp4.060.249.125.192 (Rp4,06 triliun), sedangkan pendapatan PKB triwulan I dan II tahun 2021 sebesar Rp3.749.897.646.800 (Rp3,7 triliun). Selisih triwulan III dan IV/2020 dengan triwulan I dan II/2021 yakni Rp310.351.468.392 (Rp310 miliar) atau 7,64 persen. Sementara selisih pendapatan tersebut menurut Hening juga sedikit banyak berpengaruh pada defisit anggaran APBD Jabar. Memburuknya anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri dilansir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya. Menurutnya sebelum penerapan PPKM darurat, penurunan pendapatan diprediksi hanya mencapai Rp3 triliun, namun ketika kebijakan pengetatan itu berjalan pihaknya mendapatkan laporan jika pendapatan kembali anjlok hingga Rp 2 triliun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2020-2021?
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2020-2021?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2020-2021?

Kajian Pustaka



Pajak

Definisi pajak menurut S.I. Djajadinigrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk melihara kesejahteraan secara umum.

Pajak Daerah

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dimana pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber pendapatan lokal di dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Karena melalui sektor ini, kita bisa melihat seberapa besar daerah dapat mendanai kegiatan kenegaraan dan pembangunan daerah. (Baldric, 2017:23)

METODE PENELITIAN

OPERASIONALISASI VARIABEL

Sugiyono (2018:38) menyatakan “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan”.

Dengan judul penelitian yang telah dikemukakan yaitu “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat” maka penelitian ini memiliki dua variabel yang saling berkaitan yaitu variabel bebas (*Independent variable*)

dan variabel terikat (*Dependent variable*). variabel bebas yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu variabel X adalah pajak daerah. variabel terikat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu variabel Y adalah pendapatan Asli Daerah.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah suatu proses dalam mengumpulkan data yang penting untuk keberhasilan penelitian, bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan menghasilkan kesimpulan yang tidak diragukan kebenarannya. Sumber data yang dipergunakan pada laporan ini ialah data sekunder yang didapat melalui web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang telah dipublikasikan langsung oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat periode 2017-2021 merupakan 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *non probability*. Maka kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel penelitian, adapun sampel yang digunakan adalah sebanyak 54 sampel.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, pengolahan data dengan menggunakan software khusus yang dapat digunakan, yaitu SPSS versi 25 dan Microsoft Excel. Pada laporan ini, analisis yang dipergunakan terdiri dari: Uji Normalitas Data, Korelasi Product Moment, Regresi Linier Sederhana Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas variabel independen dan dependen yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dan untuk

mengecilkkan kemungkinan terjadinya ketidak normalan data yang digunakan, jika menggunakan software spss versi 25.0 akan mendapatkan hasil dari penghitungan uji normalitas data, data yang diperoleh dari hasil tabel tes *normality kolmogorov-smirnov*, yaitu:

Tabel 4.3 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz ed Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	130633020.3 0000001
	Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Diolah menggunakan software spss versi 25.0 (2022)

Dari hasil uji normalitas data yang telah dilakukan menunjukkan variabel yang mempunyai nilai *Asymptotic Significated (2-tailed)* sebesar 0,087 yang dimana angka tersebut menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari nilai 0,05 yang dinyatakan angka tersebut berdistribusi normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa $0,087 > 0,05$ maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal.

Analisis Korelasi *Product Moment*

Pada analisis korelasi *product moment* ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen Pajak Daerah terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah, yang dimana koefisien korelasi ini menunjukkan angka yang mengarahkan kuatnya suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka perlu dilakukan pengolahan data dengan menggunakan spss 25.0 dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Korelasi Product Moment

		Pajak_Daerah	Pendapatan_Asl i_Daerah
Pajak_Daerah	Pearson	1	.986**
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	54	54
Pendapatan_Asl i_Daerah	Pearson	.986**	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah dengan *software* spss 25.0 (2022)

Dari hasil pengolahan data korelasi *product moment* dengan menggunakan *software* spss 25.0 maka nilai korelasi *product moment* antara variabel Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,986. Angka 0,986 ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat dikarenakan berada di rentan 0,80 - 1,000. Hal ini berlandaskan teori menurut (Sugiono, 2018) menjelaskan bahwa Untuk memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4. 2 Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	251881767.	22752858.		11.0	.000
		100	750		70	
	Pajak_Daerah	1.166	.027	.986	42.5	.000
					64	

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asl_Daerah

Sumber: Data diolah dengan *software* spss 25.0 (2022)

Pada hasil analisis regresi linear sederhana yang hanya terdiri dari dua variabel, dimana variabel pajak daerah (X) dan variabel pendapatan asli daerah (Y), serta hasil dari analisis ini untuk menunjukkan hubungan antaran varibel independen dan dependen mempunyai hubungan yang positif atau negatif. Dari hasil tersebut diperoleh angka yang menjelaskan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 251881767.100 + 1.166 X$$

Dimana:

Y = Pajak Daerah

a = *Constant*

b = Koefisien Regresi

X = Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil regresi linier sederhana diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika variabel (X) Pajak Daerah nilainya adalah 0, maka nilai variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah adalah konstanta sebesar 251881767.100
2. Jika nilai variabel (X) Pajak Daerah naik 1 ribu rupiah, maka akan menambahkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.166.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh variabel pajak daerah terhadap variabel pendapatan asli daerah yang dinyatakan dalam persentase. Untuk menentukan nilai koefisien determinasi maka pengolahan tersebut dilakukan dengan menggunakan *software* spss 25.0 untuk melakukan pengolahan data dan memperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 4.6 Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.972	.972	131883125.500

a. Predictors: (Constant), Pajak_Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan_Asl_Daerah

Sumber: Data diolah dengan *software* spss 25.0 (2022)

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,972)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 97,2 \%$$

Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel x terhadap variabel y sebesar 97,2 % sedangkan sisanya 2.8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil presentase ini menunjukkan tingkat pengaruh variabel x terhadap variabel y pada penelitian ini adalah sangat kuat. Pengaruh tinggi atau rendahnya koefisien determinasi dapat menggunakan pedoman sebagai berikut:

Uji Hipotesis T

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian t untuk memperlihatkan sejauh mana variabel independen secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen atau untuk mengetahui pengaruh signifikan antara pajak daerah (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Adapun syarat penerimaan hipotesis menggunakan uji-t ini adalah sebagai berikut :

- a. Ho diterima dan Ha Ditolak, apabila: $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, $-t \text{ hitung} \geq -t \text{ tabel}$
- b. Ho ditolak dan Ha diterima, apabila: $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, $-t \text{ hitung} \leq -t \text{ tabel}$

Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat dari tabel berikut:

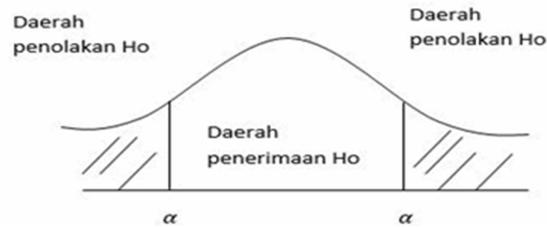
Tabel 4.8 Hasil uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	251881767.100	22752858.750		11.070	.000
	Pajak_Daerah	1.166	.027	.986	42.564	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan_Aslil_Daerah

Sumber: Data diolah dengan software spss 25.0 (2020)

Dari hasil pengolahan data diatas, menunjukkan bahwa pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah diperoleh t hitung sebesar 42,564 dengan derajat kebebasan sebesar 52 (n-k-1 yaitu 54-1-1) dan pengujian dua pihak (*two tails test*) dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka diperoleh t tabel sebesar 2,00665, sehingga angka tersebut menunjukkan nilai t hitung > t tabel (42,564 > 2,00665). Kemudian tabel signifikan pada pengujian diperoleh angka sebesar 0,000, menunjukkan nilai signifikansi < taraf signifikansi (0,000 < 0,05). Maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat.



Gambar 3. 1 Uji Dua Pihak

KESIMPULAN

1. Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2021 terjadi pada Kota Banjar sebesar Rp 14.482.830,00 sedangkan yang mengalami kenaikan tertinggi berada di Kota Bandung sebesar Rp . 2.700.000.000,00.
2. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tertinggi terdapat di Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar Rp 3.300.827.453,19 dan yang terendah pendapatan asli daerah berada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 sebesar Rp . 105.276.341,36.
3. Berdasarkan uji hipotesis Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldric, Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Carunia, M Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Endra Gunawan. 2011. *Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana. 2009. *Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar*.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rina Amalia Putri Wahyuni dan Khozin Arief .2015). *Pengaruh Efektifitas dan Kontirbusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*, Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *pajak daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*